RELASI PEMERINTAH KAMPUNG DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG DALAM MEMBANGUN KAMPUNG PERSATUAN DISTRIK MANDOBO KABUPATEN BOVEN DIGOEL PROVINSI PAPUA SELATAN

Patricia Jihan Vieira Tambonop
NPP. 33.1152
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: realpatricia03@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Ani Martini., M. Si.
Email: animartini@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement (Research Gap): *The author focuses on the problem of the suboptimal partnership between the Village Government and the Village Consultative Body (Bamuskam) in governance and development within Kampung Persatuan, Mandobo District, Boven Digoel Regency, while village governance under Papua's special autonomy context should theoretically run democratically, transparently, and responsively based on equal partnership and checks and balances.* ***Purpose:*** *This study aims to know the institutional relationship between the Village Government and the Village Consultative Body (Bamuskam) in building Kampung Persatuan.* ***Method:*** *This study uses a qualitative approach with a descriptive method and analysis according to Sutoro Eko's village institutional relations theory. The technique of collecting data are done by field observations, documentation, and semi-structured in-depth interviews with 9 key informants. The data analysis is integrated with Root Cause Analysis (RCA) using a fishbone diagram approach.* ***Result:*** *This study found that the institutional relationship between the Village Government and Bamuskam varies across its different dimensions and heavily gravitates toward dominative and collusive patterns. In the dominative dimension, the relationship is weak as the village head holds absolute control over policy direction, rendering Bamuskam passive due to insufficient regulatory literacy and a lack of financial autonomy. Meanwhile, in the collusive dimension, internal elite harmony overlooks public needs, leaving community complaints regarding nepotism in aid allocation completely unaddressed. In the conflictual dimension, a latent tension arises from the acute lack of village fund reporting transparency, suggesting that a genuine partnership has not been realized as formal consultations function merely as top-down procedural formalities.* ***Conclusion:*** *This study concludes that the relationship between the Village Government and Bamuskam has not fulfilled the normative ideal of an equal partnership due to structural imbalances. It is recommended that routine regulatory technical guidance for village officials be administered by the district, absolute transparent access to RPJMKam and APBKam documents be mandated for Bamuskam and the public, and rigorous periodic supervision from the district head be actively enforced.*

Keywords: *Bamuskam; Dominative Relations; Institutional Partnership; Village Government.*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/*Research Gap*): Penulis berfokus pada permasalahan belum optimalnya hubungan kemitraan antara Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung (Bamuskam) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kampung Persatuan, Distrik Mandobo, Kabupaten Boven Digoel, sementara itu tata kelola pemerintahan kampung di wilayah Papua memiliki karakteristik kekhususan otonomi khusus yang seharusnya berjalan secara demokratis, transparan, dan responsif. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui relasi Pemerintah Kampung dengan Badan Permusyawaratan Kampung dalam membangun Kampung Persatuan. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan analisis terhadap teori relasi kelembagaan desa Sutoro Eko. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi lapangan, studi dokumentasi, dan wawancara mendalam kepada 9 informan kunci melalui teknik *purposive* dan *snowball sampling* . Analisis data turut diperkuat dengan pendekatan *Root Cause Analysis* (RCA) melalui diagram *fishbone*. **Hasil/Temuan:** Temuan penelitian menunjukkan bahwa relasi kelembagaan antara Pemerintah Kampung dan Bamuskam memiliki kondisi yang bervariasi pada setiap dimensinya dan cenderung bersifat dominatif serta kolutif. Pada dimensi dominatif, relasi tergolong lemah di mana kepala kampung sangat dominan dalam menentukan arah kebijakan sedangkan Bamuskam pasif akibat rendahnya literasi regulasi dan ketergantungan finansial operasional. Sementara itu, pada dimensi kolutif, hubungan harmonis hanya berhenti di tingkat elitis internal sehingga komplain masyarakat terkait praktik nepotisme dan ketidakmerataan penyaluran bantuan diabaikan. Adapun pada dimensi konfliktual, muncul ketidakcocokan pandangan secara laten akibat ketiadaan transparansi laporan dana kampung, sehingga menggambarkan bahwa kedua lembaga belum berjalan dalam dimensi kemitraan yang ideal karena musyawarah formal baru sebatas pemenuhan prosedur administratif semata. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa relasi antara Pemerintah Kampung dan Bamuskam di Kampung Persatuan belum mencerminkan hubungan kemitraan yang setara akibat adanya ketimpangan kapasitas kelembagaan. Adapun saran penelitian ini yakni perlunya pihak distrik menyelenggarakan bimbingan teknis regulasi secara rutin, kewajiban pemenuhan transparansi dokumen RPJMKam dan APBKamp bagi Bamuskam dan masyarakat luas, serta optimalisasi pengawasan berkala secara intensif oleh Kepala Distrik.

Kata kunci: Bamuskam; Kemitraan Kelembagaan; Pemerintah Kampung; Relasi Dominatif.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Eksistensi desa merupakan salah satu unit pemerintahan terkecil dalam struktur politik di Indonesia yang memiliki peran sangat strategis dalam penyelenggaraan pelayanan publik serta pelaksanaan pembangunan (Achmad, 2014). Secara umum, otonomi desa dimaknai sebagai kemandirian sebuah organisasi pemerintahan untuk mengelola rumah tangganya sendiri secara berdaulat. Kemandirian tersebut memberikan hak dan kewenangan penuh bagi desa untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat tanpa harus selalu bergantung pada intervensi pemerintah di atasnya. Reformasi otonomi ini secara inheren membawa tantangan struktural tersendiri dalam penguatan kapasitas kelembagaan serta independensi di tingkat lokal (Shrikant & Lepcha,

2025). Kondisi ini menempatkan pemerintah desa di garis terdepan sebagai representasi negara yang berinteraksi secara langsung dengan warga di tingkat akar rumput. Dinamika politik dan roda pemerintahan di tingkat desa secara langsung akan menentukan kualitas demokrasi lokal serta tingkat kesejahteraan masyarakat secara komprehensif. (Rusfiana & Nurdin, 2017).

Pemerintah Indonesia secara formal mengakui kedudukan otonom ini melalui pengesahan tata regulasi yang inklusif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengaturan desa berlandaskan pada asas rekognisi, subsidiaritas, demokrasi, dan partisipasi aktif masyarakat. Pengakuan negara terhadap eksistensi desa tercermin dari penerimaan terhadap keberagaman bentuk, adat istiadat, dan karakteristik lokal di berbagai wilayah (Labolo, 2015). Asas rekognisi ini menegaskan bahwa pemerintah mengakui kesatuan masyarakat hukum atas prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional, sehingga desa bukan lagi menjadi subordinat dari kabupaten/kota melainkan mitra kerja strategis yang mandiri dalam sistem pemerintahan nasional.

Penyelenggaraan pemerintahan lokal di Provinsi Papua memiliki karakteristik yang unik karena tidak hanya berfungsi secara administratif, melainkan juga sebagai penghormatan terhadap nilai-nilai kultural masyarakat. Berlandaskan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, terdapat kekhususan nyata pada aspek nomenklatur kelembagaan kampung. Istilah desa di wilayah Papua secara khusus disebut sebagai kampung, kepala desa disebut kepala kampung, sedangkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) disebut Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam). Perubahan nomenklatur ini merefleksikan pengakuan identitas kultural tanpa mengubah substansi fungsi kelembagaan, di mana pemerintah kampung menjalankan fungsi eksekutif dan Bamuskam menjalankan fungsi legislatif, penyaluran aspirasi, serta pengawasan kinerja kepala kampung.

Struktur organisasi pemerintahan kampung dituntut mewujudkan demokrasi lokal yang berbasis musyawarah, partisipasi, dan aspirasi masyarakat yang direpresentasikan melalui Bamuskam. Kepala kampung berada di titik pusat tegangan fundamental karena harus mampu menjaga loyalitas vertikal kepada pemerintah kabupaten sekaligus responsif terhadap aspirasi horizontal masyarakat melalui Bamuskam. Sifat hubungan kerja antara kepala desa/kampung dengan Bamuskam/BPD secara normatif idealnya berkedudukan sejajar dan merupakan mitra kerja yang bersifat koordinatif dan informatif, bukan subordinatif (Wasistiono & Tahir, 2018). Keduanya adalah lembaga yang setara, tidak berada dalam hubungan hierarkis, dan diharapkan dapat bekerja secara rukun untuk mencapai tujuan bersama. Realitas empiris menunjukkan adanya asimetri kekuasaan di antara kedua lembaga tersebut. Pemerintah kampung memiliki kendali penuh atas anggaran, aparatur, dan implementasi proyek sehingga memiliki sumber daya yang jauh lebih kuat, sementara Bamuskam hanya memiliki kekuasaan deliberatif dan fungsi pengawasan yang efektivitasnya sangat bergantung pada kapasitas anggotanya . Ketimpangan kekuasaan eksekutif ini rentan melahirkan bayang-bayang sentralisasi baru di tingkat desa akibat kuatnya ketergantungan finansial anggaran operasional lembaga legislatif lokal terhadap eksekutif (Li et al., 2023). Hubungan antarlembaga tanpa kapasitas kelembagaan yang memadai dari kedua belah pihak akan mudah tergelincir ke dalam pola disfungsional, seperti dominasi eksekutif, kolusi terselubung, atau konflik terbuka yang merusak model tata kelola partisipatif. Masalah struktural tersebut sering kali diperparah oleh munculnya asimetri informasi akut di tingkat desa yang secara praktis melumpuhkan efektivitas fungsi kontrol dan penyaluran layanan publik (Kosec & Wantchekon, 2020).

Pola hubungan antara badan permusyawaratan desa dan pemerintah desa membutuhkan kerja sama yang berlandaskan pada tiga prinsip utama, yaitu kemitraan, konsultatif, dan koordinatif. Penerapan ketiga prinsip ini mencerminkan bentuk relasi ideal berupa pola kemitraan, di mana kedua

lembaga menjalin hubungan yang sejajar dan saling melengkapi melalui komunikasi terstruktur, kesamaan tujuan, serta mekanisme *checks and balances* yang sehat. Praktik tata kelola partisipatif di lapangan nyatanya sering kali menghadapi deviasi serius di mana musyawarah desa hanya dijalankan sebagai pemenuhan formalitas administratif prosedural untuk kepentingan pembangunan negara semata (Syukri, 2024). Teori relasi kelembagaan desa mengelompokkan hubungan ini ke dalam empat pola dimensi, yaitu pola dominatif, kolutif, konfliktual, dan kemitraan. Pengukuran nyata terhadap jalannya roda pemerintahan kampung dapat dibedah secara komprehensif melalui pisau analisis empat pola relasi tersebut untuk melihat sejauh mana dinamika kekuasaan beroperasi di lapangan.

Penyelenggaraan pemerintahan kampung di Kabupaten Boven Digoel telah berjalan berlandaskan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung, termasuk di Kampung Persatuan. Tata kelola pemerintahan dan pelaksanaan program pembangunan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola desa, tidak hanya pada pemenuhan aspek infrastruktur fisik dasar saja, tetapi termasuk dalam mewujudkan transparansi anggaran, akuntabilitas kebijakan, serta mengoptimalkan fungsi kontrol kelembagaan hingga mampu menciptakan iklim *checks and balances* yang sehat. Keterbukaan serta pemenuhan daya tanggap (*responsiveness*) elit lokal dalam memproses aspirasi dan keluhan warga secara inklusif menjadi elemen vital guna mencegah meluasnya sikap apatis masyarakat sipil dalam pembangunan (Gaventa & Barrett, 2012). Alasan dipilihnya fokus relasi kelembagaan antara Pemerintah Kampung dan Bamuskam dalam penelitian ringkasan skripsi ini yakni agar membangun sistem kemitraan yang demokratis dan setara pada tingkat pemerintahan terendah mulai dari tingkat kampung, dan dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat setempat termasuk aparatur kampung sebagai agen perubahan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (*Research Gap*)

Penulis berfokus pada permasalahan belum optimalnya hubungan kemitraan serta terjadinya asimetri informasi antara Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung (Bamuskam) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kampung Persatuan, Distrik Mandobo, Kabupaten Boven Digoel, sementara itu tata kelola pemerintahan kampung di wilayah Papua yang terbingkai dalam regulasi otonomi khusus seharusnya dijalankan secara demokratis, transparan, dan responsif berlandaskan asas kemitraan sejajar serta mekanisme *checks and balances* yang sehat.

Studi-studi terdahulu secara umum telah mengkaji dinamika interaksi kelembagaan desa antara eksekutif dan legislatif di berbagai wilayah Indonesia. Kecenderungan hubungan dominatif eksekutif kepala desa terhadap BPD serta lemahnya fungsi pengawasan dalam mewujudkan *good governance* di Sinjai Selatan telah dibahas oleh beberapa peneliti sebelumnya (Rahmat dkk., 2024). Namun, keterbatasan utama penelitian tersebut terletak pada lokus kajian yang berada di wilayah dengan tata kelola administratif yang relatif sudah mapan serta belum menyentuh karakteristik kekhususan otonomi daerah. Pola hubungan eksekutif-legislatif dalam pembangunan fisik juga telah dikaji di Kabupaten Malaka (Berek dkk., 2021), namun analisisnya terbatas pada satu proyek secara parsial tanpa membedah ketimpangan akses terhadap dokumen perencanaan makro.

Sementara itu, kajian mengenai sinergitas kelembagaan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (Amanu dkk., 2025) dan analisis pemanfaatan dana desa (Yusuf dkk., 2020) berhasil mengidentifikasi pentingnya keseimbangan wewenang dan menyoroti adanya sisi dominatif pemerintah desa. Namun, kedua penelitian tersebut memiliki keterbatasan karena masih berfokus pada

analisis yuridis-sosiologis normatif dan mengabaikan faktor krusial berupa jeratan ketergantungan finansial operasional legislatif yang secara riil dapat menyandera independensi kelembagaan di lapangan. Dalam konteks Papua, fungsi legislasi Bamuskam telah dikaji di Kabupaten Merauke (Silambi dkk., 2021), namun pendekatannya masih sangat normatif (hukum sosiolegal) dan belum mendekonstruksi akar masalah relasional akibat pemboikotan akses informasi secara riil. Lemahnya koordinasi kelembagaan juga ditemukan di Kabupaten Jayapura (Budiman dkk., 2022), tetapi keterbatasan laporan tersebut adalah sifatnya yang merupakan laporan pengabdian masyarakat sehingga tidak memberikan analisis teoretis dekonstruktif yang mendalam mengenai dinamika kekuasaan lokal laten.

Kondisi faktual di Kampung Persatuan memperlihatkan dinamika kekuasaan lokal yang jauh lebih kompleks dan menjadi pembeda tegas dengan lokus-lokus penelitian sebelumnya. Rendahnya tingkat pendidikan formal dengan dominasi aparatur dan anggota Bamuskam yang belum/tidak tamat sekolah hingga lulusan sekolah dasar secara langsung melemahkan literasi regulasi, mengikis rasa percaya diri, dan mendistorsi pemahaman terhadap tugas pokok kelembagaan. Kelemahan SDM ini diperparah oleh kuatnya pengaruh ikatan kekerabatan dan budaya nepotisme komunal dalam pendistribusian program pembangunan, yang menumpulkan responsivitas pengawasan dan melahirkan sikap apatis di tengah masyarakat.

Puncak dari ketimpangan hubungan ini bermuara pada terjadinya asimetri informasi yang sangat tajam, di mana dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMKam) dikuasai mutlak secara sepihak oleh pemerintah desa tanpa dapat diakses oleh Bamuskam. Ketiadaan akses dokumen ini membuat Bamuskam buta terhadap arah kebijakan anggaran dan kehilangan objek pengawasan substantif. Di sisi lain, ketiadaan otonomi finansial yang membuat anggaran operasional Bamuskam sepenuhnya tersandera oleh kebijakan kepala kampung telah melumpuhkan mekanisme *checks and balances*, sehingga mengubah musyawarah kampung dari wadah debat kebijakan menjadi sekadar formalitas prosedural demi syarat pencairan dana semata.

Posisi penelitian saat ini secara tegas hadir untuk mengisi *research gap* atau kekosongan kajian empiris yang ditinggalkan oleh berbagai penelitian terdahulu. Penelitian ini tidak sekadar memotret tata hubungan secara formal-legalistik, melainkan secara spesifik dan eksplisit membongkar mekanisme relasional laten, asimetri informasi akibat penahanan fisik dokumen perencanaan, serta belenggu ketergantungan anggaran operasional Bamuskam di bawah bayang-bayang dominasi kekuasaan lokal. Melalui pembedahan akar masalah ini, studi diharapkan mampu merumuskan strategi penguatan kemitraan sejajar yang inklusif guna menjamin keberhasilan tata kelola pemerintahan di wilayah Otonomi Khusus Provinsi Papua Selatan.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting mengingat untuk memberikan gambaran empiris mengenai relasi antara Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung (Bamuskam) di Kampung Persatuan, Distrik Mandobo, Kabupaten Boven Digoel sebagai dasar perumusan strategi oleh pemangku kebijakan dan pemerintah setempat selanjutnya dalam peningkatan efektivitas hubungan kerja kemitraan yang setara serta penguatan fungsi *checks and balances* di tengah berbagai tantangan tata kelola seperti rendahnya kapasitas sumber daya manusia kelembagaan, minimnya pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi), kuatnya pengaruh ikatan kekerabatan (nepotisme), hingga asimetri informasi akut akibat ketimpangan akses dokumen perencanaan pembangunan kampung (RPJMKam).

Apabila penelitian ini tidak dilaksanakan, maka pemerintah kampung dan pihak pemerintah distrik selaku pengambil kebijakan akan kekurangan dasar empiris yang kuat dalam memahami pola serta dinamika relasi kekuasaan antarlembaga secara faktual, sehingga perumusan strategi penguatan kapasitas tata kelola dan operasional kelembagaan berisiko tidak tepat sasaran, kurang efektif, dan tidak sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Akibatnya, upaya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta pelaksanaan pembangunan yang inklusif di wilayah otonomi khusus Provinsi Papua Selatan dapat berjalan kurang optimal, bahkan berpotensi terjebak dalam lingkaran relasi dominatif eksekutif dan kolutif elitis secara berkepanjangan karena tidak didukung oleh data serta rekomendasi yang memadai untuk perbaikan kebijakan koordinasi antarlembaga secara berkelanjutan.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks tata hubungan kelembagaan eksekutif-legislatif desa maupun konteks dinamika penyelenggaraan pemerintahan kampung di wilayah otonomi khusus. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai hubungan relasi antara kepala desa/kampung dengan BPD/Bamuskam memiliki variasi fokus, teori, metode, serta pendekatan yang digunakan. Secara garis besar, literatur terdahulu mengonfirmasi adanya kecenderungan ketimpangan kekuasaan yang melumpuhkan fungsi pengawasan kelembagaan. Hubungan dominatif eksekutif kepala desa terhadap BPD serta lemahnya fungsi pengawasan dalam mewujudkan *good governance* telah dikaji menggunakan metode kualitatif studi kasus di Desa Puncak, Sinjai Selatan (Rahmat dkk., 2024). Pola hubungan eksekutif-legislatif dalam pembangunan fisik juga diteliti menggunakan metode kualitatif deskriptif serta pendekatan pola hubungan Bintoro Tjokroamidjojo dengan lokus proyek pembangunan los pasar di Desa Bani-Bani, Kabupaten Malaka (Berek dkk., 2021). Selanjutnya, kajian mengenai sinergitas kelembagaan antara eksekutif dan legislatif desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dibahas melalui pendekatan yuridis-sosiologis normatif (Amanu dkk., 2025). Ketidaksetaraan hubungan akibat partisipasi BPD yang sebatas formalitas dikaji dalam pemanfaatan dana desa di Kecamatan Namlea (Yusuf dkk., 2020).

Konteks kekhususan wilayah Papua secara lebih spesifik melandasi beberapa studi terdahulu lainnya yang relevan. Pelaksanaan fungsi legislasi Badan Musyawarah Kampung diuji menggunakan metode hukum sosiolegal dengan fokus indikator kualitas, efektivitas, dan kemandirian di Kabupaten Merauke (Silambi dkk., 2021). Disamping itu, teknik penyusunan peraturan kampung dibahas melalui pendekatan pengabdian masyarakat dengan metode penyuluhan hukum dan pendampingan di Kampung Maribu, Kabupaten Jayapura (Budiman dkk., 2022). Secara umum, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan dominasi penggunaan metode kualitatif dan sosiolegal dengan beragam pisau analisis teoritis serta variasi karakteristik objek penelitian yang disesuaikan dengan fokus kajian masing-masing.

Sintesis terhadap seluruh penelitian terdahulu tersebut mengungkap adanya sejumlah persamaan, perbedaan, dan keterbatasan esensial yang mempertegas posisi penelitian ini. Persamaan utama terletak pada fokus substantif yang sama-sama mengupas jalinan kerja sama, tata hubungan relasi, serta interaksi kelembagaan antara pemerintah desa/kampung selaku eksekutif dengan BPD/Bamuskam selaku legislatif. Metode penelitian yang digunakan juga memiliki kesamaan, yakni didominasi oleh pendekatan kualitatif untuk menggambarkan fenomena sosial secara mendalam dan kontekstual di lapangan. Perbedaan mendasar terletak pada landasan teoretis yang digunakan, di mana penelitian saat ini secara spesifik menggunakan teori relasi kelembagaan desa Sutoro Eko (2014) yang membagi hubungan ke dalam empat dimensi (dominatif, kolutif, konfliktual, kemitraan) serta

diintegrasikan dengan metode *Root Cause Analysis* (RCA) melalui diagram *fishbone* untuk merumuskan strategi optimalisasi kelembagaan. Perbedaan lainnya terletak pada karakteristik objek dan lokus penelitian di Kampung Persatuan, Distrik Mandobo, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan, yang terikat payung hukum khusus berupa regulasi otonomi khusus Papua.

Keterbatasan utama dari berbagai penelitian terdahulu tersebut adalah sebagian besar studi hanya berfokus pada wilayah dengan tata kelola pemerintahan desa yang sudah relatif mapan secara administratif, serta cenderung melihat hubungan kelembagaan dari aspek normatif pelaksanaan undang-undang semata. Penelitian terdahulu belum mengulas secara mendalam bagaimana hambatan akses fisik terhadap dokumen perencanaan pembangunan kampung, seperti penguasaan sepihak dokumen RPJMKam oleh eksekutif, dapat mendistorsi mekanisme *checks and balances*. Masalah ketimpangan kekuasaan eksekutif ini juga rentan melahirkan bayang-bayang sentralisasi baru di tingkat desa akibat kuatnya ketergantungan anggaran operasional lembaga terhadap eksekutif, sebagaimana diisyaratkan dalam kajian tata kelola internasional (Li et al., 2023). Posisi penelitian saat ini secara tegas hadir untuk mengisi *research gap* tersebut dengan mendeduksi mekanisme relasional kelembagaan secara riil, membongkar akar masalah struktural, kultural, dan administratif yang memicu terjadinya pola relasi dominatif-kolutif, guna merumuskan strategi penguatan kemitraan yang setara dan inklusif demi keberhasilan pembangunan kampung.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, yang menawarkan kebaruan ilmiah (*novelty*) berupa kontribusi teoretis, empiris, serta konseptual bagi pengembangan ilmu pemerintahan secara makro. Kebaruan ilmiah dalam penelitian ini tidak semata-mata menonjolkan aspek metodologis operasional seperti penggunaan perangkat lunak NVivo 12, visualisasi diagram *fishbone*, analisis akar masalah (*Root Cause Analysis*), ataupun aplikasi mekanis teori relasi kelembagaan desa milik (Eko, 2014). Lebih jauh dari itu, kebaruan esensial studi ini terletak pada integrasi konseptual yang berhasil merumuskan kontribusi baru yang signifikan bagi pengembangan khazanah Ilmu Pemerintahan, khususnya dalam memahami dinamika kekuasaan lokal eksekutif-legislatif di tingkat pemerintahan terendah.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi baru bagi Ilmu Pemerintahan dengan memperluas jangkauan teori relasi kelembagaan desa ke dalam lokus yang berada di bawah payung hukum desentralisasi asimetris Otonomi Khusus Provinsi Papua. Studi ini berhasil merumuskan tesis baru bahwa dimensi kemitraan sejajar yang diidealkan secara normatif-legalistik dalam regulasi akan mengalami kelumpuhan total apabila dihadapkan pada fenomena "asimetri informasi perencanaan"yaitu penguasaan fisik secara absolut atas dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMKam) oleh eksekutif. Ilmu Pemerintahan selama ini cenderung mengabaikan penguasaan dokumen fisik sebagai instrumen hegemoni politik lokal. Melalui penelitian ini, penahanan dokumen perencanaan dikonseptualisasikan sebagai bentuk "kekuasaan administratif koersif" (*administrative coercive power*) yang secara laten mendistorsi mekanisme *checks and balances* serta melestarikan pola hubungan dominatif-kolutif yang mengacu pada basis pemikiran Eko (2014) .

Secara empiris, penelitian ini menyajikan dekonstruksi mekanisme relasional yang sangat kontekstual di Kampung Persatuan, Distrik Mandobo, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan . Kebaruan ini terlihat eksplisit ketika dibandingkan dengan studi terdahulu milik Rahmat dkk. (2024), Berek dkk. (2021), Amanu dkk. (2025) maupun Yusuf dkk. (2020) yang mayoritas memotret tata hubungan administrasi desa secara umum di wilayah yang relatif sudah mapan seperti Jawa, Sumatera, dan Sulawesi, tanpa mengupas implikasi pemboikotan akses dokumen perencanaan

terhadap distorsi keseimbangan kekuasaan. Penelitian ini secara orisinal membongkar jalinan kekuasaan lokal frontal di mana independensi lembaga legislatif kampung (Bamuskam) lumpuh bukan sekadar karena kepasifan politik, melainkan karena tersandera secara struktural oleh faktor ketergantungan finansial operasional eksekutif, rendahnya kualitas pendidikan formal atau literasi regulasi, serta jeratan budaya nepotisme kekerabatan komunal yang khas di wilayah Papua Selatan .

Kontribusi baru bagi pengembangan Ilmu Pemerintahan dicapai dengan menggeser fokus keilmuan dari yang awalnya didominasi oleh evaluasi administratif normatif-legalistik menuju ke arah analisis kritis tata hubungan kekuasaan riil di tingkat akar rumput. Penelitian ini memberikan sumbangan konseptual bagi Ilmu Pemerintahan berupa model penataan kelembagaan "Kemitraan Responsif-Inklusif" yang didesain khusus untuk mengintervensi asimetri informasi dan memutus siklus ketergantungan anggaran operasional legislatif di bawah bayang-bayang desentralisasi administrasi sebagaimana yang disoroti oleh Li et al. (2023). Dengan demikian, kebaruan ilmiah ini tidak hanya mengisi kekosongan literatur desentralisasi asimetris, tetapi juga menawarkan rekomendasi aplikatif yang presisi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan kampung di wilayah otonomi khusus.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai relasi Pemerintah Kampung dengan Badan Permusyawaratan Kampung (Bamuskam) dalam membangun Kampung Persatuan, Distrik Mandobo, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yaitu pendekatan penelitian yang berguna dalam menggali, memahami, dan menafsirkan makna holistik dari pengalaman perorangan maupun kelompok yang sedang menghadapi suatu permasalahan sosial tertentu (Simangunsong, 2017). Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada kebutuhan penelitian untuk tidak hanya mendeskripsikan fakta normatif di lapangan, melainkan juga untuk memahami secara mendalam alasan, proses, serta dinamika aktual dari jalinan relasi kekuasaan yang terjadi antara Pemerintah Kampung dan Bamuskam dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung. Dengan demikian, pendekatan ini dinilai paling tepat untuk menangkap kompleksitas realitas hubungan kelembagaan lokal di wilayah otonomi khusus yang tidak dapat dijelaskan secara kaku hanya melalui satu jenis data numerik semata.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi non-partisipan, wawancara mendalam yang semi-terstruktur, dan studi dokumentasi. Data primer diperoleh secara langsung di lapangan melalui interaksi mendalam terhadap 9 orang informan kunci yang dipilih secara strategis untuk menjamin kelengkapan perspektif. Pemilihan informan dari unsur kelembagaan kampung menggunakan teknik *purposive sampling*, sedangkan informan dari unsur masyarakat sipil menggunakan teknik *snowball sampling* (Ardieansyah dkk., 2023). Informan dari teknik *purposive* terdiri dari Kepala Kampung Persatuan sebagai informan kunci (*key informant*) karena memiliki kewenangan kebijakan dan pengambil keputusan utama di kampung, Kaur Pemerintahan sebagai

representasi unsur teknis administratif, Ketua Bamuskam selaku representasi fungsi pengawasan legislatif kampung, serta satu anggota Bamuskam. Kombinasi informan ini dipilih secara sengaja untuk memperoleh gambaran yang utuh dan berimbang dari sisi pengambil kebijakan, pelaksana teknis, dan pengawas.

Adapun mekanisme pelaksanaan *snowball sampling* untuk menjaring 5 orang informan dari kalangan masyarakat umum diawali dengan menetapkan satu informan awal, yakni seorang tokoh masyarakat setempat yang dipandang memahami peta kondisi sosial-ekonomi serta dinamika kultural warga Kampung Persatuan. Dari informan awal tersebut, proses pengembangan informan berikutnya dilakukan dengan meminta rekomendasi rujukan warga lain yang memiliki pengalaman empiris terkait fenomena penelitian—seperti warga yang pernah secara langsung mengajukan komplain pembangunan, tidak tersentuh penyaluran bantuan, atau merasakan langsung dampak kebijakan kampung. Alasan pemilihan informan tambahan secara berantai ini adalah untuk menembus sekat-sekat informasi yang tertutup dan menghindari bias subjektivitas apabila warga hanya ditunjuk oleh aparat kampung. Mekanisme ini secara langsung berkaitan erat dengan kebutuhan data penelitian guna memvalidasi ada tidaknya praktik nepotisme, mengukur daya tanggap pemerintah secara riil, serta menguji klaim keharmonisan relasi elitis dari kacamata masyarakat paling bawah.

Teknik pengujian keabsahan data dilakukan secara triangulasi untuk memastikan validitas, otentisitas, dan reliabilitas dari keseluruhan temuan penelitian. Validitas data dijaga secara ketat melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dan menyilangkan sudut pandang antara pihak pemerintah kampung selaku unsur eksekutif, Bamuskam selaku unsur legislatif, serta masyarakat selaku kontrol sosial. Triangulasi teknik juga diterapkan secara simultan dengan membandingkan hasil transkrip wawancara mendalam, pengamatan riil di lokasi, serta dokumen tertulis berupa arsip arsip resmi kampung seperti RPJMKam, APBKam, Peraturan Kampung, profil kampung, dan laporan pertanggungjawaban kegiatan. Pemanfaatan berbagai jenis sumber data sekunder ini berfungsi sebagai alat verifikasi untuk memperkuat landasan empiris sekaligus memperdalam bobot analisis konseptual dari data primer yang didapatkan (Nurdin & Hartati, 2019).

Analisis data dilakukan secara interaktif menggunakan teknik analisis data kualitatif yang meliputi tiga tahapan pokok, yaitu proses reduksi data, penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Miles et al., 2014). Proses pengolahan data kualitatif ini diproses dengan menggunakan bantuan perangkat lunak NVivo 12 melalui empat tahapan sistematis, yang melibatkan *input data* transkrip wawancara dan portofolio regulasi, proses pengodean (*coding*) untuk mengklasifikasikan intisari sumber data, visualisasi bagan grafik hubungan, hingga pengambilan kesimpulan akhir. Hasil pengolahan data tersebut kemudian dianalisis berdasarkan teori relasi kelembagaan desa yang mencakup empat dimensi hubungan kekuasaan, yaitu relasi dominatif, kolutif, konfliktual, dan kemitraan (Eko, 2014). Guna menelusuri akar penyebab dari ketidaharmonisan relasi antarlembaga tersebut secara menyeluruh, analisis data ini juga diintegrasikan secara komprehensif dengan pendekatan *Root Cause Analysis* (RCA) melalui visualisasi diagram *fishbone* Ishikawa.

Penelitian ini dilaksanakan di Kampung Persatuan, Distrik Mandobo, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan, yang menjadi lokasi riil terjadinya fenomena asimetri informasi dan

ketimpangan relasi kelembagaan. Pengumpulan data lapangan dilakukan secara efektif selama durasi tiga bulan, yaitu terhitung mulai dari minggu kedua bulan Januari 2026 hingga akhir bulan Maret 2026. Rentang waktu dan durasi penelitian ini diselaraskan secara konsisten dengan jadwal tahapan penyusunan skripsi Praja Utama IPDN Tahun Akademik 2025/2026 serta telah memperoleh legalitas hukum melalui Surat Izin Penelitian resmi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boven Digoel. Dengan durasi waktu pelaksanaan yang memadai tersebut, penelitian kualitatif ini diharapkan mampu menggambarkan kondisi interaksi sosial-politik serta tata hubungan relasi kelembagaan lokal secara aktual, komprehensif, dan kontekstual sesuai dengan dinamika riil pemerintahan kampung yang sedang berjalan di lapangan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis relasi Pemerintah Kampung dengan Badan Permusyawaratan Kampung (Bamuskam) dalam membangun Kampung Persatuan, Distrik Mandobo, Kabupaten Boven Digoel menggunakan pendapat dari Sutoro Eko yang menyatakan bahwa hubungan kelembagaan desa dapat dikelompokkan ke dalam empat dimensi, yaitu relasi dominatif, relasi kolutif, relasi konfliktual, dan relasi kemitraan. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Relasi Dominatif

Penulis melakukan pengukuran terhadap relasi dominatif melalui keterlibatan tata hubungan di mana satu pihak memiliki kontrol kekuasaan yang jauh lebih besar, sehingga menempatkan lembaga legislatif berada pada posisi subordinat yang pasif. Dimensi ini diukur melalui indikator lemahnya praktik demokrasi desa, dominasi kepala kampung dalam menentukan arah kebijakan, serta pasifnya peran Bamuskam. Hasil pengolahan data menggunakan bantuan NVivo 12 menyajikan visualisasi intensitas kata yang terekam pada Gambar 1., di mana term 'bamuskam', 'keputusan', 'menentukan', dan 'lebih' muncul sebagai isu yang paling dominan.



Sumber: Nvivo 12, diolah oleh Penulis, 2026.

Gambar 1.
Hasil Pengelolaan Nvivo 12 Dimensi Dominatif

Aspek pemenuhan nilai demokrasi di lapangan sering kali beririsan langsung dengan tingkat kepedulian warga dan ruang partisipasi yang disediakan. Berdasarkan observasi lapangan, musyawarah kampung cenderung didominasi oleh porsi arahan dari perangkat desa, sementara warga yang hadir cenderung pasif sebagai pendengar. Kondisi ini dikonfirmasi oleh hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat, Bapak Yulianus Yawok, yang mengkritisi bahwa, “Saya melihat bahwa demokrasi yang

ada di Kampung persatuan belum sepenuhnya terjadi. Pelaksanaan demokrasi di kampung persatuan saya bisa bilang rendah."

Pengakuan mengenai kelemahan partisipasi ini juga datang dari pihak aparatur. Bapak Fransiscus Nenop selaku Kaur Pemerintahan menyatakan, "Kalau dari sisi kami, demokrasi sebenarnya sudah berjalan melalui musyawarah kampung. Namun, kami juga mengakui bahwa partisipasi masyarakat masih belum maksimal." Lemahnya praktik demokrasi ini menunjukkan belum terpenuhinya prinsip tata kelola yang inklusif dalam pemerintahan lokal.

Ketimpangan hubungan kelembagaan semakin diperparah oleh adanya penguasaan informasi sepihak dalam perumusan program kerja. Hal ini dibuktikan kuat oleh temuan studi dokumentasi terhadap dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMKam). Dokumen perencanaan krusial tersebut secara faktual hanya dikuasai sepihak oleh eksekutif tanpa adanya salinan resmi yang didistribusikan kepada Bamuskam.

Ketiadaan akses dokumen tersebut mematikan fungsi pengawasan Bamuskam. Ketua Bamuskam, Bapak Victor Imbanop, mengeluhkan, "Bamuskam seharusnya memperoleh informasi yang jelas mengenai lokasi, jenis, dan progres pekerjaan, sehingga dapat melakukan pengawasan. Namun demikian, transparansi antara Pemerintah Kampung dan Bamuskam hingga saat ini belum terwujud." Bapak Linus Mana selaku anggota Bamuskam juga menegaskan bahwa mereka jarang dilibatkan secara penuh dalam perumusan awal, sehingga kehilangan arah dalam mengontrol jalannya proyek.

Faktor internal berupa kelumpuhan kapasitas sumber daya manusia turut andil dalam menempatkan kedudukan Bamuskam menjadi pasif di hadapan eksekutif. Hasil observasi lapangan memperlihatkan bahwa kantor sekretariat Bamuskam di Kampung Persatuan terpantau jarang beroperasi atau dibuka untuk menerima aduan harian warga. Kondisi ini memicu pandangan miring masyarakat, seperti yang diutarakan Ibu Florentina Tingge yang menyatakan bahwa peran Bamuskam di tengah masyarakat sama sekali tidak terlihat dan jarang turun untuk mendengar keluhan.

Penulis menyimpulkan bahwa pengukuran terhadap relasi dominatif di Kampung Persatuan tergolong sangat kuat. Kepala kampung memegang kendali penuh atas kebijakan akibat penguasaan dokumen secara sepihak, yang berpadu dengan lemahnya literasi hukum Bamuskam serta budaya subordinasi lokal.

3.2. Relasi Kolutif

Pengukuran terhadap relasi kolutif dilakukan melalui indikator jalinan hubungan kerja yang tampak harmonis di tingkat elitis internal, namun mengabaikan partisipasi publik secara luas. Pembahasan dimensi ini dikonfirmasi melalui visualisasi *Word Frequency* NVivo 12 pada Gambar 2. yang memperlihatkan jalinan kata kunci 'tidak', 'pemerintah', 'kampung', dan 'masyarakat' sebagai bentuk pemisahan ruang antara kebijakan elitis dengan aspirasi warga.



Sumber: Nvivo 12, diolah oleh Penulis, 2026.

Gambar 2.
Hasil Pengelolaan Nvivo 12 Dimensi Kolutif

Jalinan kemitraan internal elitis diklaim oleh pihak aparatur telah berjalan sangat serasi tanpa riak konflik yang berarti. Kajian dokumentasi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan juga memperlihatkan bahwa program pembangunan fisik sering kali diklaim terealisasi 100% tanpa adanya catatan evaluasi kritis tertulis dari pihak Bamuskam. Hal ini mengindikasikan adanya keharmonisan kompromis di atas kertas yang mengesampingkan pengawasan substansial.

Klaim keharmonisan ini ditegaskan oleh Kepala Kampung, Bapak Andreas Yaulunop, yang menyatakan, "Tidak ada hambatan. Semua berjalan dengan lancar tanpa mis-komunikasi. Pembangunan yang dilakukan dapat diselesaikan hingga 100%." Bapak Fransiscus Nenop selaku Kaur Pemerintahan turut mendukung dengan mengeklaim bahwa Bamuskam dan Pemerintah Kampung selalu bersinergi dengan baik.

Namun, praktik hubungan yang terlalu intim secara elitis ini berimplikasi langsung pada tidak ditanggapinya komplain serta usulan dari warga. Observasi di lokasi penelitian mengungkapkan adanya ketimpangan distribusi fasilitas fisik, di mana perbaikan sering kali terpusat pada lingkungan atau keluarga yang dekat dengan aparatur kampung. Hal ini dibenarkan oleh warga, Bapak Bonefasius Maluwop, yang mengkritisi bahwa perhatian pemerintah selama ini lebih banyak diberikan kepada kelompok atau keluarga tertentu saja, sehingga warga umum belum tersentuh pemerataan.

Fenomena tebang pilih ini dipertegas lebih lanjut oleh Bapak Martinus Obyandit yang menambahkan bahwa program usulan warga sering kali dibiarkan mengendap dalam waktu lama tanpa realisasi. Penulis menyimpulkan bahwa relasi kolutif di Kampung Persatuan berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Keakraban hubungan internal terbukti digunakan untuk melegitimasi keputusan sepihak eksekutif dan menyembunyikan praktik nepotisme pendistribusian bantuan, sehingga melanggar prinsip keadilan dan inklusivitas.

3.3. Relasi Konfliktual

Penulis melakukan pengukuran terhadap relasi konfliktual melalui indikator ketidakcocokan pandangan serta ketegangan laten yang dipicu oleh ketiadaan transparansi pengelolaan anggaran keuangan kampung. Gambar 3. menyajikan visualisasi klaster data NVivo 12 yang mempertegas adanya sumbatan informasi serius antara ruang eksekutif dan legislatif kampung terkait pengelolaan finansial.



Sumber: Nvivo 12, diolah oleh Penulis, 2026.

Gambar 3.
Hasil Pengelolaan Nvivo 12 Dimensi Konfliktual

Ketidakcocokan pandangan mengenai keterbukaan pengelolaan Dana Kampung memicu hubungan kerja yang retak di tingkat pimpinan. Penelusuran dokumentasi terhadap arsip Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKam) membuktikan bahwa tidak terdapat rekam jejak penyusunan laporan tertulis periodik yang diserahkan oleh eksekutif kepada Bamuskam pasca-pencairan dana. Ketiadaan dokumen pertanggungjawaban ini mematikan fungsi audit legislatif tingkat lokal.

Meskipun Kepala Kampung, Bapak Andreas Yaulunop, mengklaim bahwa pemanfaatan anggaran selalu dibahas secara terbuka, kenyataan di lapangan berkata lain. Ketua Bamuskam, Bapak Victor Imbanop, membantah keras dengan menyatakan, "Pemerintah Kampung tidak memberikan laporan secara jelas kepada Bamuskam. Kurangnya transparansi ini menyebabkan fungsi kontrol Bamuskam tidak berjalan optimal." Ketiadaan data ini membuat Bamuskam kehilangan pijakan untuk mengkritisi arah kebijakan fisik di lapangan.

Akar ketegangan laten ini semakin diperparah oleh penyanderaan ruang gerak institusional secara finansial. Hasil observasi kelembagaan mengonfirmasi bahwa alokasi anggaran operasional dan tunjangan untuk Bamuskam sepenuhnya menyatu dalam struktur APBKam yang pencairannya dikendalikan mutlak oleh Kepala Kampung. Kondisi ini diakui memicu ketakutan psikologis di kalangan anggota legislatif. Bapak Victor Imbanop membeberkan bahwa posisi mereka yang bergantung pada kebijakan finansial eksekutif membuat usulan yang diajukan Bamuskam tidak pernah terakomodasi sepenuhnya dan memicu keengganan untuk bersikap kritis.

Penulis menyimpulkan bahwa relasi konfliktual di Kampung Persatuan bersifat laten. Ketegangan yang tersembunyi ini berakar pada penguasaan dominan terhadap dokumen keuangan oleh eksekutif serta ketergantungan struktural Bamuskam, yang melumpuhkan secara total independensi mekanisme *checks and balances*.

3.4. Relasi Kemitraan

Penulis melakukan pengukuran terhadap relasi kemitraan berdasarkan pemenuhan indikator hubungan sejajar yang dilandasi nilai demokrasi desa yang kuat, keterbukaan informasi, serta daya tanggap yang tinggi terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat. Pola jaringan kata kunci NVivo 12 pada Gambar 4. merekam harapan interaksi ideal (melalui kata 'bersama', 'musyawarah', dan 'pembangunan') yang sayangnya belum sepenuhnya berjalan di lokasi penelitian.



Sumber: Nvivo 12, diolah oleh Penulis, 2026.

Gambar 4.
Hasil Pengelolaan Nvivo 12 Dimensi Kemitraan

Pelaksanaan kedaulatan demokrasi substantif di Kampung Persatuan secara faktual masih terbatas di permukaan semata. Observasi langsung pada pelaksanaan forum kegiatan kampung memperlihatkan bahwa musyawarah lebih difokuskan pada pemenuhan syarat administratif, seperti daftar hadir, ketimbang perdebatan atau dialektika kebijakan yang konstruktif. Hal ini diutarakan oleh Tokoh Masyarakat yang mengamati bahwa secara formal musyawarah memang diadakan, namun yang dilibatkan hanyalah perwakilan tertentu, sementara keputusan krusial tetap dikunci secara sepihak oleh eksekutif.

Rendahnya tingkat responsivitas (*responsiveness*) kelembagaan dalam menindaklanjuti keluhan warga umum menjadi bukti kegagalan terwujudnya dimensi kemitraan ini. Ketiadaan dokumentasi mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) pengaduan masyarakat di balai kampung memvalidasi lemahnya sistem pelayanan tersebut. Akibatnya, komplain warga sering kali menguap tanpa tindak lanjut penanganan yang jelas.

Bapak Linus Mana selaku anggota Bamuskam membenarkan bahwa tuntutan masyarakat sering kali belum berkembang menjadi kebijakan nyata selama belum menjadi konflik besar yang menekan. Padahal, harapan mendasar warga adalah jalinan kerja sama yang kolaboratif agar program bantuan tepat sasaran, sebagaimana diutarakan oleh Ibu Florentina Tingge. Penulis menyimpulkan bahwa relasi kemitraan di Kampung Persatuan masih jauh dari ideal akibat adanya sumbatan aliran informasi, ketiadaan regulasi penanganan aduan, serta kuatnya budaya birokrasi subordinasi.

3.5. Diskusi Temuan Utama

Interpretasi akademik terhadap dinamika sosiopolitik di Kampung Persatuan menunjukkan bahwa interaksi antara Pemerintah Kampung dan Bamuskam mengalami distorsi struktural yang mendalam. Fenomena konvergensi antara pola relasi dominatif dan kolutif yang ditemukan di lapangan mengindikasikan bahwa keharmonisan administratif yang tampak di permukaan bukanlah wujud dari konsolidasi demokrasi, melainkan sebuah instrumen hegemoni eksekutif. Ketika aparatur desa mengeklaim keberhasilan pelaksanaan pembangunan tanpa hambatan komunikasi, realitas empiris di tingkat akar rumput justru memperlihatkan penutupan ruang deliberatif publik yang masif . Kondisi ini melahirkan apa yang disebut sebagai bias kemitraan elitis, di mana kesepakatan antar-aktor kelembagaan tidak diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik harian, melainkan untuk melanggengkan distribusi program pembangunan berbasis patronase kekerabatan atau nepotisme.

Temuan ini membawa implikasi teoretis yang signifikan terhadap pengembangan kerangka analisis relasi kelembagaan desa yang dirumuskan oleh Sutoro Eko (2014). Teori asli mengasumsikan bahwa empat dimensi relasi yaitu dominatif, kolutif, konfliktual, dan kemitraan berdiri sebagai entitas yang terpisah atau bergerak secara linier seiring berjalan beriringannya proses demokratisasi lokal.

Namun, dalam konteks desentralisasi asimetris di wilayah otonomi khusus Papua, dimensi-dimensi tersebut terbukti mengalami hibridisasi dan saling mengunci di dalam sistem.

Relasi dominatif eksekutif tidak memicu resistensi atau berkembang menjadi dimensi konfliktual yang terbuka karena tersandera oleh variabel "pemboikotan akses dokumen perencanaan" dan "ketergantungan operasional finansial" . Ketegangan konfliktual direduksi secara paksa oleh eksekutif melalui mekanisme penyanderaan anggaran operasional, sehingga memaksa Bamuskam masuk ke dalam perangkap relasi kolutif-subordinatif demi mempertahankan eksistensi material kelembagaannya. Oleh karena itu, penelitian ini mengimplikasikan perlunya rekonstruksi teoretis terhadap pemikiran Sutoro Eko dengan memasukkan variabel asimetri informasi fisik dokumen perencanaan dan perangkap anggaran operasional (*budgetary entrapment*) sebagai elemen struktural utama yang mengunci kelembagaan desa dalam status pseudo-kemitraan .

Kontribusi baru penelitian ini terhadap pengembangan kajian relasi kelembagaan kampung dalam ranah Ilmu Pemerintahan terletak pada kemampuannya menggeser fokus analisis dari yang bersifat formal-legalistik menuju ke arah analisis sosiologi kekuasaan riil di tingkat bawah. Kajian ini memberikan sumbangan konseptual berupa dekonstruksi terhadap asumsi kesetaraan normatif kelembagaan desa yang selama ini didengungkan dalam literatur administrasi pemerintahan desa seperti pemikiran Wasistiono & Tahir (2018).

Melalui pembongkaran akar masalah struktural di wilayah Papua Selatan, studi ini membuktikan secara empiris bahwa pemberian otonomi daerah yang luas tanpa dibarengi dengan jaminan transparansi akses dokumen substantif (seperti dokumen RPJMKam) dan kemandirian finansial legislatif hanya akan melahirkan desentralisasi otoritarianisme eksekutif lokal. Model analisis integratif antara pemikiran tata hubungan desa dengan pendekatan *Root Cause Analysis* (RCA) diagram *fishbone* dalam penelitian ini menjadi kontribusi metodologis yang menawarkan alternatif baru bagi para ilmuwan pemerintahan dalam memetakan serta mengintervensi disfungsi kelembagaan pada ekosistem sosiokultural komunal yang kuat.

3.6. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Dinamika relasi antara Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung (Bamuskam) di Kampung Persatuan dipengaruhi oleh interaksi berbagai faktor struktural, regulatif, dan sosiokultural yang saling mengunci di tingkat lapangan. Faktor-faktor tersebut mencakup dimensi internal kelembagaan hingga variabel eksternal yang bersumber dari karakteristik lingkungan sosial masyarakat otonomi khusus. Pembahasan mendalam mengenai faktor-faktor determinan tersebut diuraikan sebagai berikut.

Pertama, faktor ketergantungan anggaran Bamuskam kepada Pemerintah Kampung menjadi akar pelemahan struktural yang paling krusial dalam mekanisme kontrol. Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKam) menunjukkan bahwa alokasi anggaran operasional kantor maupun pencairan tunjangan bulanan anggota Bamuskam secara administratif masih menyatu dan bergantung sepenuhnya pada regulasi finansial eksekutif. Implikasi finansial ini melahirkan hambatan psikologis di mana para anggota legislatif kampung cenderung bersikap pasif dan enggan menjalankan fungsi pengawasan secara vokal karena adanya kekhawatiran sanksi berupa pemandekan anggaran operasional oleh kepala kampung. Ketiadaan otonomi anggaran ini mengubah hakikat hubungan kemitraan sejajar menjadi hubungan instruktif-subordinatif.

Kedua, rendahnya literasi regulasi di kalangan anggota Bamuskam memperlebar ketimpangan fungsional antarlembaga. Keterbatasan pemahaman teknis terhadap peraturan perundang-undangan seperti regulasi tata kerja Badan Permusyawaratan Desa yang tertuang dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 membuat fungsi legislasi dan evaluasi LKP-Kam menjadi lumpuh. Kondisi ini diperparah

oleh ketiadaan program pelatihan atau bimbingan teknis yang terencana dari pemerintah daerah. Rendahnya literasi regulasi ini beririsan dengan latar belakang pendidikan formal anggota yang didominasi lulusan SLTA dan SLTP, sehingga menurunkan rasa percaya diri kelembagaan saat berhadapan dengan jajaran Pemerintah Kampung dalam forum pengambilan keputusan.

Ketiga, dominasi penguasaan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMKam) oleh pihak eksekutif menjadi instrumen asimetri informasi yang melumpuhkan *checks and balances* . Temuan dokumentasi dan observasi mengonfirmasi bahwa dokumen perencanaan makro tersebut dikuasai secara eksklusif oleh pemerintah desa, sementara pihak Bamuskam sama sekali tidak memegang salinannya. Tanpa adanya akses fisik terhadap dokumen RPJMKam, Bamuskam secara praktis kehilangan objek dan indikator pengawasan substantif. Akibatnya, Bamuskam tidak mampu menilai kesesuaian antara rencana program jangka menengah dengan draf Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKPKam) yang diajukan oleh eksekutif.

Keempat, budaya kekerabatan yang sangat kuat di Kampung Persatuan menjadi faktor sosiokultural yang memicu meluasnya praktik nepotisme. Dalam kehidupan komunal masyarakat lokal, sekat-sekat kekeluargaan sering kali mengaburkan objektivitas tata kelola pemerintahan. Kritik atau pengawasan ketat yang dilayangkan oleh Bamuskam terhadap jalannya program fisik sering kali disalahartikan secara pejoratif sebagai bentuk serangan personal atau ketidaksopanan terhadap keluarga besar aparatur kampung. Dampak dari kuatnya ikatan primordial ini memicu bias pendistribusian jaminan bantuan sosial dan pembangunan rumah layak huni yang cenderung tebang pilih dan mengutamakan kerabat dekat elit kampung.

Kelima, rendahnya transparansi informasi publik menciptakan sumbatan akuntabilitas yang masif. Pemerintah Kampung secara faktual tidak pernah mempublikasikan dokumen APBKam, laporan pertanggungjawaban penggunaan dana, maupun progres realisasi fisik pembangunan pada papan pengumuman terbuka atau media komunitas. Ketiadaan prosedur tetap (SOP) pelaporan pertanggungjawaban pasca-pencairan dana kampung kepada Bamuskam dan publik membuat tata kelola keuangan berjalan secara tertutup. Sumbatan informasi ini menutup rapat akses kontrol sosial dan menyulitkan Bamuskam maupun masyarakat untuk melakukan pelacakan potensi penyimpangan anggaran.

Keenam, lemahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kampung menjadi faktor pelengkap disfungsi relasi antarlembaga. Hasil observasi langsung membuktikan bahwa pelaksanaan musyawarah kampung harian cenderung berjalan sebagai formalitas seremonial demi menggugurkan syarat administratif prosedural pencairan anggaran semata. Elit kampung hanya mengundang lingkaran perwakilan tertentu secara berulang tanpa membuka ruang dialektika bagi warga secara inklusif. Kekecewaan warga akibat aspirasi dan komplain pembangunan bawah (*bottom-up*) yang berulang kali diabaikan tanpa tindak lanjut penanganan akhirnya melahirkan budaya apatisme publik yang akut.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa relasi Pemerintah Kampung dengan Badan Permusyawaratan Kampung (Bamuskam) dalam membangun Kampung Persatuan belum berjalan dengan optimal dikarenakan adanya dominasi eksekutif yang kuat serta hubungan kerja yang bias ke arah pola kolutif elitis internal. Selain menempatkan kepala kampung sebagai figur dominan mutlak dalam pengambilan keputusan, perihal ketimpangan akses akibat penguasaan sepihak dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMKam) ini menambahkan temuan baru yang memperluas penelitian pada bidang tata kelola kelembagaan lokal di wilayah otonomi khusus. Guna

meningkatkan efektivitas relasi kemitraan yang setara, disarankan untuk menyelenggarakan program bimbingan teknis regulasi secara rutin bagi perangkat kampung dan anggota Bamuskam agar meningkatkan literasi aturan serta membuka akses dokumen anggaran APBKamp secara transparan kepada masyarakat luas. Pemerintah setempat beserta jajaran distrik juga seyogiannya mampu melakukan evaluasi kinerja koordinasi berkala serta melakukan inovasi pada forum musyawarah agar tidak sekadar berjalan sebagai pemenuhan formalitas administratif semata.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu kampung saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan karakteristik lokus otonomi khusus di Kabupaten Boven Digoel.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan dinamika relasi kemitraan kelembagaan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan kampung di Kabupaten Boven Digoel untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Kampung Persatuan beserta jajaran Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung (Bamuskam) Persatuan yang telah memberikan izin, kesempatan, dan bantuan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian lapangan. Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Dekan Fakultas Politik Pemerintahan, Ketua Program Studi Politik Indonesia Terapan, serta dosen pembimbing dan tim dosen penguji yang telah meluangkan waktu untuk memberikan ilmu, bimbingan, arahan, dan saran konstruktif selama proses penyusunan karya ilmiah ini. Ungkapan terima kasih tak terhingga juga dipersembahkan kepada orang tua, keluarga tercinta, serta rekan-rekan Praja IPDN Angkatan XXXIII yang senantiasa memberikan dukungan moril, doa, dan motivasi, serta seluruh pihak yang telah tulus membantu dan menyukseskan pelaksanaan penelitian ini hingga selesai.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Achmad, M. (2014). *Manajemen dan tata kelola pemerintahan desa: Perspektif regulatif dan aplikatif*. Balai Pustaka.

Amanu, D., Utami, N. S., & Isnaeni, D. (2025). Synergy of village consultative body and village head toward good governance. *Academia Open*, *10*(2), 1–13. https://doi.org/10.21070/acopen.10.2025.12746

Ardieansyah, Asmungi, & Latip. (2023). *Metode penelitian sosial* (1st ed.). Deepublish.

Berek, E. Y., Festianto, D., & Kolne, Y. (2021). Relasi kepala desa dan BPD dalam proses pembangunan los pasar. *JPPOL: Jurnal Poros Politik*, *3*(1), 41–52. https://jurnal.unimor.ac.id/index.php/JPP/article/view/1964

Budiman, E. A., Hutabalian, R., & Jemaru, S. (2022). Sosialisasi tentang teknik atau tata cara penyusunan peraturan kampung di Kampung Maribu Distrik Sentani Barat, Kabupaten Jayapura. *Sepakat: Sesi Pengabdian Pada Masyarakat*, *2*(2), 68–73. https://doi.org/10.56371/sepakat.v2i2.112

Eko, S. (2014). *Desa membangun Indonesia*. Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).

Gaventa, J., & Barrett, G. (2012). Mapping the outcomes of citizen engagement. *World Development*, *40*(12), 2399–2410. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2012.05.014

Kosec, K., & Wantchekon, L. (2020). Can information improve rural governance and service delivery? *World Development*, *125*, 104376. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.07.017

Labolo, M. (2015). *Dinamika politik dan pemerintahan lokal.* Ghalia Indonesia.

Li, Y., Chen, S., & Peng, Y. (2023). In the shadow of administrative decentralization: The impact of devolution on subnational service provision. *American Review of Public Administration*, *53*(7–8), 280–295. https://doi.org/10.1177/02750740231185849

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.

Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi penelitian sosial*. Media Sahabat Cendekia.

Rahmat, S., Nawawi, D., & Irwan, A. L. (2024). Relasi badan permusyawaratan desa dengan kepala desa: Mewujudkan good governance di Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, *5*(2), 987–996. https://doi.org/10.52423/neores.v5i2.269

Rusfiana, Y., & Nurdin, I. (2017). *Dinamika politik kontemporer: Internasional dan lokal dengan hambatan dan tantangan dalam pencapaiannya*. Alfabeta.

Shrikant, A., & Lepcha, D. (2025). The challenges of local self-government in transitional and post-conflict societies and strategies for effective governance. *Lex Localis: Journal of Local Self-Government*, *23*(1), 234–238. https://lex-localis.org/index.php/LexLocalis/article/view/800246

Silambi, E. D., Samderubun, F., Ruslan, A., & Halim, H. (2021). Optimalisasi fungsi legislasi Badan musyawarah kampung. *Sasi*, *27*(3), 314–322. https://doi.org/10.47268/sasi.v27i3.403

Simangunsong, F. (2017). *Metodologi penelitian pemerintahan: Teoritik, legalistik, empirik dan inovatif* (3rd ed.). Alfabeta.

Syukri, M. (2024). Indonesia's new developmental state: Interrogating participatory village governance. *Journal of Contemporary Asia*, *54*(1), 2–23. https://doi.org/10.1080/00472336.2022.2089904

Wasistiono, S., & Tahir, I. (2018). *Administrasi pemerintahan desa*. Universitas Terbuka.

Yusuf, S., Umanailo, C. B., & AR, N. (2020). Relasi kepala desa dan badan perwakilan desa dalam pemanfaatan dana desa di Kecamatan Namlea. *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, *4*(2), 130–140. https://doi.org/10.24198/jsg.v4i2.25251